

2012	72,54
2013	81,12
2014	100,04

Sumber: Bidang Kesehatan Keluarga, Laporan PWS-KIA

J. Pelayanan Neonatal

Neonatal merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan, sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan kesehatan pada bayi perlu dilakukan kunjungan neonatus (KN). Kunjungan neonatal dilakukan minimal 3 kali, yaitu 2 kali pada neonatal usia 0-7 hari dan 1 kali pada usia 8-28 hari.

Tabel 3. 16 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2014

Tahun	Cakupan Kunjungan Neonatal
2010	98,74
2011	95,8
2012	81,44
2013	96,13
2014	104,9

Sumber: Bidang Kesehatan Keluarga, Laporan PWS-KIA

K. Pelayanan Komplikasi Neonatal

Neonatal komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dana atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan dan kelainan kongenital lainnya. Penanganan neonatus komplikasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat), baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, sesuai standar antara lain sesuai dengan standar Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM), manajemen asfiksia bayi baru lahir, manajemen bayi berat lahir rendah, pedoman pelayanan neonatal esensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya.

Tren capaian penanganan neonatal komplikasi menunjukkan grafik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan capaian di tahun 2014 adalah yang tertinggi selama kurun 5 (lima) tahun terakhir. Dari total perkiraan sasaran neonatal komplikasi (15% dari jumlah bayi) sebesar 309 bayi, 304 diantaranya telah tertangani sesuai dengan standar yang ada.

Tabel 3. 17 Pelayanan Komplikasi Neonatal

Tahun	Cakupan Pelayanan Komplikasi Neonatal
2010	65,46
2011	58,15
2012	69,86
2013	80,94
2014	98,3

Sumber: Bidang Kesehatan Keluarga, Laporan PWS-KIA

L. Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam peningkatan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Pelayanan kesehatan bayi ditunjukkan pada anak umur 0 hari s/d 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan maupun di rumah, posyandu dan tempat lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter, bidan atau perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 7 kali, yaitu 1 kali pada umur 1-3 hari, 3-7 hari, 8-28 hari, 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pemberian imunisasi dasar, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif dan makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

Tabel 3. 18 Cakupan Kunjungan Bayi

Tahun	Cakupan Kunjungan Bayi
2010	97,53
2011	92,54
2012	77,63
2013	89,96
2014	95,6

Sumber: Bidang Kesehatan Keluarga, Laporan PWS-KIA

Capaian di tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2013. Dari total 2.062 sasaran bayi yang ada, sebanyak 95,6% diantaranya memperoleh pelayanan kesehatan dari petugas kesehatan atau naik sebesar 5,64% dari capaian tahun 2013 yang hanya sebesar 89,96%.

M. Pelayanan Kesehatan pada Anak Balita

Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berusia 12 sampai dengan 59 bulan. Kegiatan pelayanan kesehatan yang

dilakukan diantaranya: 1) Pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8 kali dalam setahun dan stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakan instrument SDIDTK, 2) Pembinaan posyandu, pembinaan anak prasekolah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan konseling keluarga pada kelas ibu balita dengan menggunakan Buku KIA, 3) Pemberian makanan bergizi seimbang serta suplementasi vitamin A dosis tinggi 2 kali setahun. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Mojokerto dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 3. 19 Perkembangan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Tahun	Perkembangan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
2010	96,78
2011	90,7
2012	78,7
2013	85,16
2014	93,2

Sumber: Bidang Kesehatan Keluarga, Laporan PWS-KIA

Tren cakupan pelayanan kesehatan anak balita mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik, setelah turun drastis di tahun 2012. Bahkan capaian di tahun 2014 ini sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur sebesar 87%.

N. Jumlah Ketersediaan Pojok ASI

Tersedianya pojok asi merupakan faktor penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam penerapan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak karena pelayanan tersebut sangat dibutuhkan oleh ibu untuk tetap menjaga gizi balita meskipun sedang bekerja maupun berada di luar ruangan. Pelayanan pojok asi tidak hanya ramah terhadap anak namun juga terhadap ibu-ibu menyusui karena dapat menjaga privasi saat sedang menyusui meskipun sedang bekerja ataupun beraktivitas di luar rumah.

Tabel 3. 20 Jumlah Pojok ASI dan Konselor ASI di Kota Mojokerto

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Konselor ASI di tingkat kelurahan	58,20%	65%	70%
Puskesmas yang memiliki konselor ASI	14	15	16
Sarasehan ASI Eksklusif	60%	50%	60%
Pendampingan bumil risti dan ASI Eksklusif oleh	20%	40%	100%

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
kader			
Jumlah ruang laktasi dan fasilitas menyusui	14	16	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

O. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program imunisasi adalah capaian UCI (*Universal Child Immunization*)

UCI merupakan gambaran suatu desa/ kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa. Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, yakni BCG 1 kali, DPT 3 kali, HB 3 kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali.

Cakupan UCI di Kota Mojokerto sampai dengan tahun 2014 berhasil dipertahankan di angka 100%, itu artinya seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto telah mencapai UCI. Walaupun pencapaian UCI di Kota Mojokerto cukup memuaskan, namun tetap diperlukan adanya kewaspadaan dini, mengingat masih ditemukannya kasus P3I di masyarakat.

P. Jumlah Ketersediaan Lembaga Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental

1) Mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi prioritas utama bagi provider kesehatan, utamanya dalam era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) saat ini, semua sarana pelayanan kesehatan dituntut harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat, baik sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan dan khusus.

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan rawat jalan serta rawat inap bagi puskesmas yang dilengkapi dengan sarana tempat tidur (Psuksemas Perawatan). Sedangkan untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, rumah sakit menjadi sarana rujukan bagi puskesmas.

Pada tahun 2014 jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan pelayanan rawat jalan di puskesmas sebanyak 229.724 orang dan pelayanan rawat inap sebanyak 1.334 orang. Bila

digambarkan dalam bentuk grafik, perbandingan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di puskesmas selama tahun 2010-2014 terlihat sebagai berikut.

Tabel 3. 21 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas di Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2014

Tahun	Rawat Jalan	Rawat Inap
2010	228.519	1.636
2011	195.355	1.698
2012	234.943	1.475
2013	221.994	1.583
2014	229.724	1.334

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan

Q. Keberadaan Anak Dari Keluarga Miskin Yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan

Tabel 3. 22 Banyaknya Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera Menurut Kecamatan Tahun 2013

Keluarga Sejahtera (1)	Kecamatan		Jumlah (4)
	Prajurit Kulon (2)	Magersari (3)	
Keluarga Prasejahtera	2.184	1.375	3.559
Keluarga Sejahtera	12.116	17.050	29.166
Sejahtera I	3.065	3.108	6.173
Sejahtera II	2.886	5.050	7.936
Sejahtera III	4.508	6.879	11.387
Sejahtera III Plus	1.657	2.013	3.670
Jumlah Kepala Keluarga	14.300	18.425	32.725

Sumber: Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto

Tabel 3. 23 Permasalahan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2013

Jenis Permasalahan Sosial	Kecamatan		Jumlah Total
	Prajurit Kulon	Magersari	
Anak Terlantar	27	69	96
Pengemis/ Gelandangan	187	11	198
Wanita Tuna Susila	89	1	90
Korban Narkotika	-	1	1
Anak Nakal	-	-	-
Mantan Napi	10	9	19

Sumber: Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto

R. Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Bersih

Jumlah akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Mojokerto pada tahun 2014 sebesar 4.597 pelanggan dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 808.770 m³. Pada tahun 2015 rata-rata konsumsi air bersih per pelanggan per tahun adalah 179,1 m³ atau mengalami kenaikan sebesar 1,8 persen dari tahun sebelumnya. Sebanyak 850.359 m³ air bersih disalurkan kepada pelanggan dengan jumlah pelanggan air bersih yang mengalami peningkatan menjadi sebanyak 4.748 pelanggan. Dengan kata lain, Kota Mojokerto mampu mengatasi kenaikan jumlah rumah tangga yang

memerlukan air bersih dengan jumlah yang bertambah setiap tahunnya.

S. Keberadaan Kawasan Tanpa Rokok

Keberadaan kawasan tanpa rokok di Kota Mojokerto mulai digalakkan dari tingkat RT/ RW, Kelurahan hingga tingkat Kota/ Pemerintahan. Keseriusan Kota Mojokerto dalam penanganan permasalahan rokok di kawasan umum tercermin dalam adanya larangan merokok di lokasi rumah sakit dan puskesmas dengan memasang tanda larangan merokok. Begitu juga dengan kawasan perkantoran, tempat-tempat perbelanjaan, dan lokasi pendidikan. Kawasan tanpa rokok di Kota Mojokerto menjadi fokus utama dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Mojokerto.

3.1.4 Kluster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

A. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan agar semua anak usia 0-6 tahun memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan sesuai dengan tahap perkembangan atau tingkat usia. PAUD merupakan pendidikan persiapan untuk melanjutkan pendidikan di SD/MI.

PAUD dilaksanakan melalui jalur formal di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Pada tahun 2013 jumlah TK negeri sebanyak 2 lembaga, dan TK/RA swasta sebanyak 62. Jumlah KB-TPA swasta sebanyak 20. Gambaran mengenai perkembangan lembaga sistem PAUD dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3. 24 Keadaan Lembaga Satuan PAUD Tahun 2010 s/d 2013

Satuan Pendidikan	2010/2011		2011/2012		2012/2013	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK	2	55	2	57	2	57
RA	-	6	-	6	-	6
KB	-	14	-	14	-	14
TPA	-	2	-	2	-	2

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

B. Partisipasi Siswa Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dan menengah atau

sedang sekolah (SD, SLTP, dan SLTA) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 3. 25 Angka Partisipasi Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2011 - 2015

Angka Partisipasi Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	97,53	97,94	98,34	98,83	98,59
SMP/ MTs	87,79	89,61	90,62	94,32	94,59
SMA	57,69	61,30	63,64	70,13	70,32
PT	14,47	15,94	20,04	22,74	22,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2011-2015

Angka partisipasi sekolah Kota Mojokerto tahun 2011 – 2015 untuk jenjang SMP, SMA dan PT mengalami peningkatan secara linier atau teratur, hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah dalam keseriusan menangani permasalahan pendidikan di Kota Mojokerto mengalami keberhasilan yang pada akhirnya meningkatkan kegiatan belajar mengajar siswa di Kota Mojokerto. Dengan adanya keseriusan pemerintah, diharapkan Kota Mojokerto dapat memiliki orang-orang kreatif, inovatif dengan segala kecerdasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat turut serta mengembangkan Kota Mojokerto agar lebih maju.

C. Keberadaan Sekolah Ramah Anak (SRA)

Keberadaan sekolah ramah anak di Kota Mojokerto saat ini masih belum sepenuhnya dapat terwujud, namun masing-masing pihak sekolah telah memiliki rencana dalam mengembangkan sekolah untuk dapat menjadi sekolah ramah anak. Usaha dalam mewujudkan sekolah ramah anak ini salah satunya yaitu menjadikan sekolah menjadi sekolah dengan penghargaan adiwiyata. Telah banyak sekolah-sekolah di Kota Mojokerto yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, diantaranya yaitu pada tabel berikut,

Tabel 3. 26 Daftar Sekolah Yang Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata di Kota Mojokerto

Tingkat	SD	SMP	SMA
TAHUN 2016			
Tingkat Kota	SDN Kranggan 4	-	-
	SDN Gedongan 2	-	-
Tingkat Provinsi	SDN Kranggan 1	SMP Negeri 3	-
	SDK Wijana Sejati	SMP Negeri 6	-
Tingkat Nasional	-	SMP Negeri 6	SMA Negeri 1
	-	SMP Negeri 9	

Tingkat Mandiri	SDN Wates 6	-	SMA Negeri 2
TAHUN 2017			
Tingkat Kota	SDN Miji 1	SMP Islam Brawijaya	SMA PGRI
	SDN Wates 6	SMP Permata	-
	SD Muhammadiyah Plus	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

D. Keberadaan Sekolah Yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak Ke dan Dari Sekolah

Keberadaan sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Kota Mojokerto perlahan-lahan terwujud seiring adanya program pemerintah yang menerapkan angkutan gratis bagi pelajar yang bersekolah di Kota Mojokerto. Dengan adanya angkutan gratis, keamanan dari pelajar menjadi lebih terjamin, hal ini juga membuat pelajar lebih bisa untuk membiasakan diri menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi. Saat ini, angkutan-angkutan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto yaitu 13 angkutan umum (angkot/ lyn) gratis, 2 unit bus dan 3 unit mobil luxio untuk menunjang terwujudnya sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.

E. Ketersediaan Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif Yang Ramah Anak, Diluar Sekolah Yang Dapat Diakses Semua Anak

Tabel 3. 27 Banyaknya Perkumpulan Kesenian Sosial Budaya Tahun 2011 – 2013

No	Jenis Perkumpulan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Band	3	3	3
2.	Orkes Melayu	15	8	8
3.	Ketoprak	-	1	1
4.	Ludruk	4	4	4
5.	Campur Sari	6	6	6
6.	Seni Rupa/ Sanggar Tari	-	2	2
7.	Reog/ Rebana	1	1	1
8.	Dalang Wayang Kulit	4	3	3
9.	Kuda Lumping	1	6	6
10.	Fashion Show	-	1	1
11.	Samroh/ Qosidah	3	2	2
12.	Janggrung/ Pengamen	-	1	1
13.	Seni Pencak	-	1	1
14.	Lawak	-	1	1
15.	Sanggar Seni	3	3	3
16.	Karawitan	1	1	1
Jumlah Total		41	44	44

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

3.1.5 Kluster 5 - Perlindungan Khusus

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera. Adanya unit pelayanan perempuan dan anak di Polres Kota Mojokerto merupakan wujud dari keseriusan Kota Mojokerto dalam mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota Layak Anak. Dengan adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Kota Mojokerto menjadikan perlindungan perempuan dan anak di Kota Mojokerto terjamin.

3.1.6 Kluster Umum: Penguatan Kelembagaan

A. Ketersediaan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan Terkait Anak

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terutama adalah peraturan daerah (perda). Dimana substansi perda tersebut mencakup pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak. Selain perda, peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota/ Bupati, dan peraturan Kepala Desa/ setingkat. Dan kebijakan yang dimaksud antara lain (namun tidak terbatas) berupa keputusan, Instruksi, dan/ atau Edaran.

B. Ketersediaan Anggaran Untuk Pemenuhan Hak Anak Termasuk Anggaran Penguatan Kelembagaan

Yang dimaksud adalah bahwa setiap SKPD mengalokasikan anggarannya untuk program pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan. Dimana alokasi tersebut meningkat setiap tahunnya.

C. Tingkat Partisipasi Forum Anak Dan Kelompok Anak Dalam Penyusunan Program Kegiatan dan Kebijakan

Sesuai pasal 4 pada UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memfasilitasi Forum Anak Kota

Mojokerto untuk aktif berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya kepada lingkungan sebaya dan lingkungan masyarakat.

Semakin banyak aktivitas yang dilakukan Forum Anak untuk berperan serta dan menanamkan kepekaan sosial atas permasalahan yang dihadapi di lingkungan terdekat mereka. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni bakti sosial ke panti asuhan, sosialisasi tentang hak-hak anak di tempat umum semisal Benteng Pancasila, pertemuan rutin setiap satu bulan sekali dilaksanakan untuk mengkoordinasikan dan sharing pengalaman baru. Forum Anak yang terdiri dari perwakilan seluruh sekolah SMP dan SMA se Kota Mojokerto ini juga bertugas sebagai konselor bagi teman sebaya di sekolah masing-masing, sehingga perwakilan forum anak selalu siaga dan siap mengantisipasi adanya bullying di lingkungan pertemanan remaja dan lingkungan sekolah.

Kegiatan Penguatan Forum Anak ini sebagai upaya agar anak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, kemampuan dan semakin aktif berpartisipasi dengan lingkungan. Bangkitnya Forum Anak Kota Mojokerto diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kota Mojokerto sebagai kota layak anak

D. Ketersediaan Kualitas SDM Yang Memadai Terkait Klaster Hak Anak (KHA)

Pelatihan yang dimaksud adalah yang memenuhi standar materi, pendalaman masalah dan penanganan isu anak berdasarkan KHA. Tenaga/ petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak. Hal ini diharapkan tenaga/ petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif dan memperhatikan pendapat anak.

E. Ketersediaan Profil Anak

Unsur utama pengembangan KLA adalah data. Data KLA telah dipastikan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan wilayah kecamatan. Data sangat bermanfaat bagi kota dalam perencanaan pemenuhan hak dan pembangunan secara luas. Dengan terpilahnya data dan besaran masalah anak yang diketahui dapat

digunakan untuk membantu menyusun kebijakan/ program/ kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah anak tersebut.

F. Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak Anak

Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/ masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/ atau penyediaan dana. Misalnya layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas seni dan budaya.

G. Keterlibatan Dunia Usaha Dalam Pemenuhan Hak Anak

Keterlibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, pemberayaan keluarga/ masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/ atau dana. Misalnya: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi; serta penyediaan yempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi atau Telepon Sahabat (TESA).

BAB IV

RUMUSAN MASALAH

4.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berguna untuk merangkum persoalan-persoalan, akar masalah, aksi kunci dan pihak-pihak yang terlibat dalam perwujudan Kota Layak Anak. Hal ini sangat diperlukan untuk pembuatan RAD KLA Kota Mojokerto, ini dikarenakan rumusan masalah digunakan untuk mengetahui permasalahan yang harus diatasi dan memudahkan dengan dirangkum menjadi satu-kesatuan masalah dari berbagai kluster sesuai dengan perwujudan KLA Kota Mojokerto

4.1.1 Rumusan Masalah Penguatan Kelembagaan (Kluster Umum)

Tabel 4. 1 Rumusan Masalah Kluster Umum

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
1.	Belum optimalnya susunan peraturan perundang-undangan kelembagaan Kota Layak Anak mengenai kebijakan perlindungan anak di Kota Mojokerto	Kurangnya keseriusan pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Kota Layak Anak	Bappeko, Bag. Hukum	Terbentur oleh kurang adanya kerjasama yang baik antar SKPD	Terlampir di Logframe (RAD-KLA)
2.	Belum teralokasinya dana APBD untuk implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas mengenai alokasi dana Kota Layak Anak	Bappeko, Bag. Hukum	Terbentur kerjasama antar SKPD yang kurang dan belum adanya peraturan perundangan-undangan yang jelas mengatur tentang penyediaan anggaran untuk Kota Layak Anak	Terampir di Logframe
3.	Belum Terbentuknya wadah partisipasi bagi anak, sehingga aspirasi belum bisa tersampaikan dengan baik	Tidak paham mengenai hakikat forum anak	BKBPP, Bappeko, Balitbang	Koordinasi belum optimal, penguatan kelembagaan belum pernah dilakukan dan belum ada program kerja	Terlampir di Logframe
4.	Masih kurang adanya keterlibatan forum anak dan kelompok anak dalam penyusunan program kegiatan dan kebijakan yang menyangkut permasalahan anak	Masih belum terbentuknya wadah partisipasi bagi anak	BKBPP	Belum adanya pemahaman mengenai pentingnya pelibatan forum anak dalam penyusunan program kegiatan dan kebijakan	Terlampir di Logframe
5.	Belum terpenuhinya kualitas SDM yang	Belum adanya SDM yang dilatih khusus	BKBPP	Belum adanya pengadaan pelatihan khusus	Terlampir di Logframe

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
	memadai terkait KHA di Kota Mojokerto	untuk menangani Konvensi Hak Anak		yang di rencanakan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Ahli bagi KHA	
6.	Masih kurang adanya keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Mojokerto	Belum adanya dokumen/ peraturan yang mengatur tentang keterlibatan dunia usaha terhadap pemenuhan hak anak	Dinas Kesehatan, BKBPP, Bappeko, Diskominfo	Kurang aktifnya stakeholder untuk mendorong dunia usaha agar lebih memperhatikan pemenuhan hak anak	Terlampir di Logframe
7.	Belum optimalnya penyusunan profil anak di Kota Mojokerto	Masih belum lengkapnya database berupa akte kelahiran	Dispendukcapil	Masih belum adanya program jemput bola bagi pendataan-pendataan yang berkaitan dengan penduduk	Terlampir di Logframe
		Masih banyak warga yang menyepelekan atau kurang sadar dengan pendaftaran akte untuk identitas anak		Kurangnya sosialisasi bagi warga dan masyarakat menengah kebawah dalam hal kemudahan pengurusan akte kelahiran	
8.	Belum optimalnya keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Lembaga masyarakat masih belum memiliki pedoman dalam keterlibatan lembaga pemenuhan hak anak	BKBPP	Stakeholder masih belum memiliki dasar atau acuan yang pasti dan paten untuk pelibatan masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Terlampir di Logframe

Sumber: Hasil Analisis Data RAD-KLA

4.1.2 Rumusan Masalah Hak Sipil dan Kebebasan (Kluster 1)

Tabel 4. 2 Rumusan Masalah Hak Sipil dan Kebebasan

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
1.	Belum terpenuhinya hak pencatatan kelahiran bagi semua anak di Kota Mojokerto (cakupan akta kelahiran)	Masih banyak warga yang menyepelekan atau kurang sadar akan pentingnya pendaftaran akte untuk identitas anak	Dispendukcapil	Terburut aturan sehingga membutuhkan waktu yang agak lama dan proses yang terlalu rumit	Terlampir di Logframe
2.	Belum tersedianya fasilitas informasi layak anak di tempat publik di seluruh Kota	Belum adanya payung hukum atau peraturan yang mengharuskan penyediaan	Kantor perpustakaan dan arsip, DLH	Kerjasama antar stakeholder masih kurang untuk pemenuhan fasilitas informasi layak anak	Terlampir di Logframe

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
	Mojokerto	fasilitas layak anak, sehingga tidak menjadi program yang diprioritaskan			
3.	Minimnya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan terbaik anak di Kota Mojokerto	Masih kurangnya keaktifan wadah partisipasi bagi anak untuk dapat memberikan masukan terhadap program Kota Mojokerto	BKBPP, Kecamatan dan Kelurahan terkait	Kurang adanya kerjasama antar stakeholder yang membawahi terbentuk dan terkendalinya wadah partisipasi bagi anak agar dapat segera dimanfaatkan oleh anak-anak	Terlampir di Logframe
		Masih belum adanya kepercayaan dari pemerintah akan keberhasilan pembangunan pemerintahan dengan adanya campur tangan dari aspirasi anak		Kurang rapi dan terkoordinirnya pembentukan wadah partisipasi bagi anak sehingga aspirasi dari anak masih belum dapat disampaikan secara baik	Terlampir di Logframe

Sumber: Hasil Analisis Data RAD-KLA

4.1.3 Rumusan Masalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Kluster 2)

Tabel 4. 3 Rumusan Masalah Lingkungan Keluarga daxn Pengasuhan Alternatif

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
1.	Masih adanya anak-anak yang menikah dengan usia perkawinan di bawah 18 tahun	Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak-anak atas pergaulan anak muda jaman sekarang	BKBPP, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Bag. Adm Kesra	Stakeholder yang pasif mengenai kesungguhan pelaksanaan jam wajib belajar dengan tidak adanya pengawasan ketat pada jam-jam belajar	Melaksanakan parenting skill dengan memberikan informasi seksual yang memadai sehingga bisa ditransformasi kepada anak-anaknya sesuai usia

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
		Masih adanya anak yang terjaring operasi pekat, menandakan bahwa kurang terdidiknya mental, pembinaan individu serta keimanan dari masing-masing anak yang terjaring operasi		Orang tua dan pihak sekolah yang tidak memberikan bekal informasi yang cukup kepada anak mengenai seksual dan bahayanya, tidak memperhatikan perkembangan anak secara seksama	Sosialisasi bahaya atau resiko menikah di usia dini
				Kurang adanya pengawasan dari pihak sekolah, orang tua dan dinas terkait terhadap pendidikan siswa setelah pulang sekolah sehingga banyak anak sekolah yang tidak memanfaatkan waktu saat pulang sekolah untuk beristirahat dengan baik	
				Sekolah tidak memberikan informasi yang cukup mengenai seksual dan bahayanya kepada anak didiknya, cenderung memprioritaskan kecerdasan kognitif anak didiknya sehingga mengabaikan pendidikan moral dan pembentukan karakter terhadap anak didiknya	
				Masyarakat cenderung apatis terhadap perilaku sosial dan asusila yang dilakukan oleh anak	
	Kurangnya informasi mengenai permasalahan seksual yang diberikan kepada anak	Anak, keluarga dan guru/ pihak sekolah		Anak cenderung lebih percaya terhadap informasi yang diberikan teman sebayanya daripada informasi yang disampaikan oleh orang tuanya	Sosialisasi KHA: Memberikan sosialisasi KHA dan regulasi mengenai pembatasan pemberian

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
				<p>Dari sisi keluarga membericarkan hal-hal yang berbau seksual dianggap tabu, kurang memahami cara berkomunikasi dengan anak, sibuk bekerja</p> <p>Dari sekolah, minimnya informasi seksual yang dimiliki, masih berfikir secara konvensional bahwa seksualitas tabu untuk dibicarakan dengan anak di bawah umur</p>	informasi pornografi serta sanksinya
		<p>Menjamurnya berbagai media baik cetak maupun elektronik yang memudahkan siapa saja mengakses informasi tanpa filterisasi</p>	Pemilik usaha warnet, dishubkominfo	<p>Pihak sekolah terbentur dengan target yang sudah ditetapkan oleh instansinya bahwa anak didik harus mencapai target tertentu terkait kecerdasan kognitifnya</p> <p>pemilik warnet mengejar target untuk mendapatkan untung yang tinggi, tidak ada sanksi yang menjerakkan ketika mereka tertangkap tangan menyediakan akses informasi pornografi</p>	mengadakan seminar mengenai KHA kepada awak media
2.	<p>Belum adanya lembaga yang menangani konsultasi bagi orang tua/ keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak</p>	<p>Belum adanya payung hukum tentang peraturan yang mengatur tentang penyediaan konsultasi layanan pengasuhan dan keperawatan anak</p> <p>Kurang optimalnya pemerintah dalam mendukung ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak</p>	<p>BKBPP, Dinsos, Dinkes</p> <p>Dinsos, Disnakertrans</p>	<p>Pembuatan peraturan mengenai KHA terlalu aman dan kurang adanya kerjasama antar stakeholder yang berkaitan</p> <p>masyarakat/ keluarga masih menganggap bahwa urusan yang melibatkan anak adalah urusan internal rumah tangga saja</p>	<p>Terlampir di Logframe</p> <p>Sosialisasi pentingnya lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak</p>

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
				kurangnya SDM dan pemahaman mengenai tupoksi terkait dengan ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Peningkatan kapasitas SDM tentang KHA dan konsep lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
3.	Belum tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Minimnya kemauan orang tua untuk berkonsultasi mengenai permasalahan keluarga maupun perawatan anak	BKBPP	Pembentukan LKSA terganjal oleh tenaga ahli yang kurang dan peraturan yang tidak jelas mengenai pembentukan LKSA	Terlampir di Logframe
		Kurang optimalnya pemerintah dalam mendukung ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial anak		masyarakat/ keluarga masih menganggap bahwa urusan yang melibatkan anak adalah urusan internal rumah tangga saja, dan urusan ABK adalah semata urusan pemerintah saja	Sosialisasi pentingnya lembaga kesejahteraan sosial anak
				kurangnya SDM dan pemahaman mengenai tupoksi terkait dengan ketersediaan lembaga kesejahteraan dan sosial anak	Peningkatan kapasitas SDM tentang KHA dan konsep lembaga kesejahteraan anak

Sumber: Hasil Analisis Data RAD-KLA

4.1.4 Rumusan Masalah Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Kluster 3)

Tabel 4. 4 Rumusan Masalah Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
1.	Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)	Masih adanya perkawinan anak dibawah usia 18 tahun yang secara kesehatan dan psikologis belum mengerti dengan benar mengenai kesiapan mental mengenai reproduksi	Dinas Kesehatan, BKBPP		Terlampir di Logframe

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
		Proses persalinan ibu dan bayi yang ditangani oleh tenaga biasa (bukan tenaga kesehatan/ medis)			
2.	Belum tercapainya imunisasi dasar lengkap di Kota Mojokerto	Imunisasi yang masih belum merata di semua wilayah dan kurang adanya perhatian dari orang tua terhadap anak mengenai pentingnya imunisasi anak	Dinas Kesehatan	Kurang terbuka dan meratanya pencatatan imunisasi oleh stakeholder terkait.	Terlampir di Logframe
3.	Masih belum terpenuhinya Gizi pada Balita di Kota Mojokerto secara merata	Minimnya pengetahuan ibu mengenai pemenuhan gizi yang sesuai pada balita Seringkali ibu/ orang tua tergantung pada makanan instan untuk balita dan terlalu sibuk sehingga tidak bisa memberikan ASI dengan optimal	Dinas Kesehatan	Kurangnya pemberian sosialisasi mengenai pemenuhan gizi bayi dan pengadaan acara penyuluhan mengenai gizi bayi oleh para ahli gizi Kurangnya program sosialisasi mengenai dampak baik dan buruknya menggunakan makanan instan untuk pemenuhan gizi pada balita dan perbandingannya dengan gizi ASI	Terlampir di Logframe
4.	Masih belum optimalnya pemberian ASI eksklusif dan tersedianya pojok ASI	Banyak ibu yang sibuk berkegiatan diluar rumah (kerja) sehingga pemberian ASI Eksklusif terhambat bahkan tergantikan oleh susu formula	Dinkes	Stakeholder yang belum memperhatikan tentang kebutuhan ibu dan bayi menjadikan penyediaan pojok ASI diruang terbuka atau tempat umum dan lokasi kerja bukan prioritas yang harus diutamakan.	Terlampir di Logframe
5.	Rendahnya cakupan ASI Eksklusif	Banyaknya ibu bekerja Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu bayi akan pentingnya ASI	Ibu bayi, petugas kesehatan, pemerintah, swasta (LSM, Forum Peduli ASI), kader kelurahan, pimpinan perusahaan/ pemilik tempat bekerja	Kurangnya kerjasama lintas sektor mengenai pengetahuan ibu menyusui akan pentingnya ASI bagi anak Kurangnya kesempatan dan fasilitas memberi ASI pada bayi karena ibu bekerja	Pemberian kesempatan memeras ASI di tempat bekerja dengan dibantunya ruang pojok ASI khusus ibu Pengadaan fasilitas pojok ASI

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
		Jumlah konselor ASI masih sangat terbatas		Pendanaan (biaya pelatihan konselor ASI sangat besar) Kurangnya kemampuan kader kesehatan di kelurahan dalam memberikan informasi ASI	Sosialisasi pentingnya ASI Sosialisasi dan fasilitasi pojok ASI
6.	Belum adanya ruang laktasi di lingkungan Kota Mojokerto	Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang keberadaan ruang laktasi bagi ibu dan bayi	Dinkes	Masih terhambat dengan kerjasama antar stakeholder dikarenakan masih belum adanya peraturan yang menyusun dan mengatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing stakeholder yang terlibat	Terlampir di Logframe
7.	Belum tersedianya lembaga penyedia layanan kesehatan reproduksi dan mental	Rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan mental	Dinkes, Dinsos, BKBP	Kurangnya tenaga ahli yang khusus dalam mengetahui dan menangani tentang layanan kesehatan reproduksi dan mental Kurang adanya minat dan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan reproduksi dan mental	Terlampir di Logframe
8.	Belum tersedianya kawasan tanpa rokok	Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok bagi anak-anak dan orang-orang di sekitar Belum adanya peraturan perundang-udangan yang mengatur mengenai penyediaan kawasan tanpa rokok khusus di lingkungan kerja, lingkungan sosial dan ruang terbuka	DPU, Dinkes, Satpol PP	Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan keseriusan penekanan dan peringatan perokok di ruang terbuka khususnya disekitar anak-anak dan perempuan Stakeholder yang masih belum memiliki payung hukum menjadi terbatas dalam menerapkan kawasan tanpa rokok	Terlampir di Logframe

Sumber: Hasil Analisis Data RAD-KLA

4.1.5 Rumusan Masalah Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya (Kluster 4)

Tabel 4. 5 Rumusan Masalah Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
1.	Belum adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (usia pras-sekolah/ 0-6 tahun)	Kurangnya partisipasi masyarakat & kesadaran masyarakat tentang PAUD	Diknas	Pendanaan yang di terapkan khusus untuk PAUD masih kurang sehingga pembangunan dan perhatian terhadap PAUD yang telah ada kurang merata	Terlampir di Logframe
2.	Belum tersedianya Sekolah Ramah Anak di Kota Mojokerto	Belum ada produk hukum terkait Sekolah Ramah Anak	Diknas, DLH, Dinkes, Diskominfo, Dishub	Dinas terkait : Belum ada KIE ttg SRA, Belum ada Koordinasi, masing-masing berjalan dg prog.nya sendiri2	Terlampir di Logframe
		Stakeholder terkait belum memahami SRA & perannya sesuai tupoksi masing-masing	Warga sekolah (guru, wali murid, KS)	KS & Guru : Belum ada KIE tentang SRA; Paradigma Pendidikan Tanpa Kekerasan belum ada kesamaan persepsi; Belum melibatkan wali Murid & Siswa dalam pembentukan karakter anak; cenderung merasa terbebani dengan prog. Pusat	
		Tidak adanya koordinasi	Wali murid	Siswa : belum sepenuhnya menyadari tanggungjawab & belum terlibat sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan di sekolah	
		Paradigma Pendidikan tanpa kekerasan belum difahami sepenuhnya (masih ada perbedaan pendapat)		Wali Murid : sebagian cenderung tidak peduli / pasif, tidak faham pendidikan anak, fokus pada akademik	
3.	Belum optimalnya penyediaan rute aman dan selamat ke/ dari sekolah	Belum adanya Zona Aman Sekolah yang sesuai standar Dephub dan Belum optimalnya pendidikan disiplin berlalulintas pada Siswa	Dishub, Diknas, Kepolisian, Sekolah, Siswa, Wali murid	Stakeholder terkait belum memahami ZoSS (Zona Selamat Sekolah)	Terlampir di Logframe
				Belum adanya ketersediaan anggaran yang diperuntukkan ZoSS	

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
4.	Belum optimalnya penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif anak di luar sekolah	Belum adanya pemahaman tentang fasilitas rekreatif dan kegiatan kreatif anak yang ramah anak	Diknas, Disporabudpar, Siswa, Walimurid	Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas masih terbatas oleh anggaran dana yang tersedia.	Terlampir di Logframe
		Belum tergalinya potensi alam dan kearifan lokal yang menjadi sarana rekreatif dan kreatif anak		Kurang adanya pemahaman tentang kebutuhan rekreatif dan kegiatan kreatif di Luar Sekolah untuk anak	

Sumber: Hasil Analisis Data RAD-KLA

4.1.6 Rumusan Masalah Perlindungan Khusus (Kluster 5)

Tabel 4. 6 Rumusan Masalah Perlindungan Khusus

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
1.	Masih ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan	Kurangnya edukasi di lingkungan keluarga mengenai hal-hal yang sepatutnya atau tidak sepatutnya diajarkan kepada anak	BKBPP, Dinsos	Kurang adanya perhatian orang tua terhadap anak dikarenakan orang tua yang terlalu sering sibuk bekerja dan tidak mengetahui kehidupan sehari-hari anaknya	Terlampir di Logframe
		Tingginya pengaruh buruk dari teman-teman dan internet memicu terjadinya banyak anak yang melakukan tindakan-tindakan kriminal		Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah dan stakeholder terkait tentang pergaulan yang harus dijauhi dan yang tidak baik di lingkungan luar sekolah	
		Kurangnya perhatian dari orang tua mengenai pembatasan penggunaan internet dan pembatasan pergaulan anak yang kurang baik		Masih kurangnya pengadaan sosialisasi yang memberikan pemikiran dan tindakan-tindakan positif terhadap mental dan tumbuh kembang anak dalam meraih cita-citanya	

NO	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	PERSOALAN YANG DIHADAPI STAKEHOLDER	AKSI KUNCI
3.	Masih adanya Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA)	Dorongan masalah ekonomi keluarga yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya	Dinsos, BKBPP, Dinas Ketenagakerjaan, Diknas, Penegak Hukum, Disperindag	Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dan kurang adanya sosialisasi ataupun penyuluhan kepada warga kurang mampu mengenai hak dan perlindungan anak	Terlampir di Logframe
		Tidak adanya pemantauan dari pihak perusahaan atau tempat kerja mengenai siapa saja yang diperbolehkan bekerja maupun tidak selama hal tersebut tidak mengganggu kelancaran pekerjaan dan menguntungkan perusahaan		Kurang adanya kontrol dari pemerintah mengenai anak-anak dibawah umur yang bekerja di tempat-tempat tidak seharusnya dengan cara mengevaluasi, sidak maupun mendata perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mojokerto.	

Sumber: Hasil Analisis Data RAD-KLA

BAB V **PROGRAM AKSI** (LOGICAL FRAMEWORK)

5.1 Visi dan Misi Kota Layak Anak

Visi merupakan sebuah gagasan atau rumusan yang secara umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, oleh karena itu visi RAD KLA Kota Mojokerto ini adalah: "***Terwujudnya Kota Mojokerto Sebagai Kota Yang Menjamin Terpenuhinya Hak Anak***"

5.2 Maksud Penyusunan RAD-KLA Kota Mojokerto

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkuaitas, berakhhlak mulia dan sejahtera ;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat ;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak ;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- f. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal

5.3 Kluster Di Dalam Penyusunan RAD-KLA Kota Mojokerto

- a. Kluster Umum: Penguatan Kelembagaan
- b. Kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan
- c. Kluster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- d. Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- e. Kluster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
- f. Kluster 5: Perlindungan Khusus

A. Kluster Umum: Penguatan Kelembagaan

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
Belum optimalnya susunan peraturan perundang-undangan ketimbangan Kota Layak Anak mengenai kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Mojokerto	1 Penyusunan peraturan pendukung KLA	la. Perda Kota Layak Anak lb. Perda Wajar 12 tahun	Belum Ada Ada	- ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	Bappeko Dinas Pendidikan	
	1c. Perwali PKMBP	Ada	Ada	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan	
	1d. Perwali KDK	Ada	Ada	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan	
	1e. Perwali Rumah Aman	Belum Ada	-	-	✓	✓	✓	Dinsos	
	1f. Perda ASI	Belum Ada	-	-	✓	✓	✓	Dinkes	
	1g. Perda Penyelegaraan Administrasi Kependudukan	Ada	✓	✓	✓	✓	✓	Dispendukcapil	Mulai dari 2014
	1h. Perda Kawasan Tanpa Rokok	Belum Ada	-	✓	✓	✓	✓	Bagian perekonomian, Dinas Kesehatan	Masih berupa draf.
	1i. Perwali Kurikulum Wajib Pramuka	Belum Ada	-	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan	
	1j. Perwali Sekolah Ramah Anak	Belum Ada	-	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan	
	1k. Perwali Puskesmas Ramah Anak, RSU Ramah Anak	Belum Ada	-	✓	✓	✓	✓	RSU, Dinkes	
	1l. Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ada	✓	✓	✓	✓	✓	BKBPP	Perda No 9 Tahun 2016
	1m. Perwali Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ada	✓	✓	✓	✓	✓	BKBPP	Th.2017
	1n. Perda Tentang Pekerjaan Anak	Belum	-	-	✓	✓	✓	Dinsos (disnaker)	Perlu dikaji ulang
	1o. Perwali Kawasan Tanpa Rokok	Belum	-	✓	✓	✓	✓	Dinkes	Rencana 2017 dibentuk perwali
Belum teralokasinya dana APBD untuk implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD) dalam rangka memenuhi hak anak pada setiap SKPD	1 Evaluasi anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak	1. Prosentase anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak	Ada	Ada dan meni ngkat setiap	Bappeko	KLA Terintegrasi dengan RPJMD, Rensra SKPD, RKPd, dan Renja SKPD			

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
Belum terbentuknya wadah partisipasi bagi anak, sehingga seluruh aspirasi anak belum dapat tersampaikan dengan baik melalui forum anak yang aktif di Kota Mojokerto	1 Pembentukan Forum Anak di Kota Mojokerto	1a. Forum Anak di Kota Mojokerto	Ada	✓	✓	✓	✓	BKBPP	Sejak tahun 2015
		1b. Forum Anak di tingkat kecamatan	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP, Bappeko dan Kecamatan	
		1c. Forum Anak di tingkat kelurahan	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP dan Kecamatan/ Kelurahan	
	2 Penelitian dan pengembangan Kota Layak Anak	2 Kajian Sekolah Ramah Anak dan Kajian Puskesmas Ramah Anak	Belum Ada	-	✓	✓	✓	Balitbang	Ada tahun 2016
		3 Pembentukan gugus tugas Kota Layak Anak	SK Gugus Tugas Kota Layak Anak	Ada	Berfungsi	Berfungsi	Berfungsi	BKBPP	
	4 Rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak	4 Jumlah rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP dan Bappeko	Minimal 1 tahun 2 kali. (Belum ada anggaran untuk rapat koordinasi)
		5 Penyusunan RAD KLA (Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak)	Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Belum Ada	-	✓	✓	Bappeko	
	Masih kurang adanya keterlibatan forum anak dan kelompok anak dalam penyusunan program kegiatan dan kebijakan untuk menyukkseskan Kota Layak Anak di Kota Mojokerto	1 Melatih dan mengevaluasi pengurus forum anak yang telah terbentuk tentang manajemen organisasi dan program agar dapat berjalan dengan optimal	1	Prosentase pengurus forum anak yang mendapatkan pelatihan untuk pengembangan organisasi dan program-program yang dibentuk oleh anak	Belum Ada	-	✓	BKBPP	Ada, Akan diadakan Jambore forum anak di Tingkat Kota Mojokerto pada Tahun 2017
		2 Mengadakan rembug anak secara rutin	2a Jumlah rembug anak yang dilaksanakan	Belum Ada	6x	12x	✓	BKBPP, Kecamatan,	

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
Belum terpenuhinya kualitas SDM yang memadai terkait KHA (Konvensi Hak Anak) di Kota Mojokerto	1 Peningkatan SDM untuk menunjang pelaksanaan Konvensi Hak Anak	2b Prosentase aspirasi pendapat dan pandangan anak yang terakomodir dalam rekomendasi rembug anak oleh pengambil kebijakan	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP, Bappko	Kelurahan
	1 Jumlah sumber daya manusia (SDM) terlatih untuk menunjang Konvensi Hak Anak (KHA)	1 Jumlah sumber daya manusia (SDM) terlatih untuk menunjang Konvensi Hak Anak (KHA)	Belum Ada	50	100	150	200	BKBPP	Pelatihan Kluster Hak Anak (KHA), terutama bagi gugus tugas KLA (perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, tenaga medis, pekerja sosial, penegak hukum, forum anak, masyarakat, pendidik/pengelola). Tahun 2017 ada rencana pelatihan sekolah ramah anak dan Pelatihan tenaga diversi
2 TOT/ TOF Konvensi Hak Anak	2 Jumlah ASN bersertifikasi TOT/ TOF Konvensi Hak Anak	2 Belum Ada	-	-	20	40	BKD	Pelatihan khusus yang memenuhi standar materi KHA.	
3 Keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	3 Jumlah Kegiatan LSM dan Media Massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	3 Belum Ada	Ada dan meningkat setiap tahun	BKBPP, Bag Humas dan Protokol, Dinas kominfo, Bakesbangpol	Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program				

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/SKP	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
4.	Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Pendampingan kasus KDRT/ P2IP2A	4 Jumlah pers rilis terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak 5 Prosentase pendampingan kasus KDRT	- % Ada	-	12	12	12	Dinas BKBP, Bagian Humas Protokol, dan Dinas Kominfo	bersama, penyediaan fasilitas/ tumbuh kembang anak. Pada tahun 2015 pernah diadakan kegiatan Diklat jurnalistik anak.
5	Sosialisasi perundangan terkait KDRT	6 Jumlah peserta sosialisasi undang-undang terkait KDRT, TPPO ('Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan pornografi	100%	100%	100%	100%	100%	BKBP	
6	Talkshow mengenai program penguan kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	7a Jumlah talkshow yang dilaksanakan	Ada	100	300	400	500	BKBP	
7	Roadshow ke tiap-tiap sekolah tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini	7b Radiospot tentang hamil pra nikah	24 x	24 x	24 x	24 x	24 x	BKBP, Dinas Kominfo	5 kali sehari
8	Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	8 Jumlah roadshow ke sekolah yang dilaksanakan	Ada	✓	✓	✓	✓	I bulan 4 kali (seminggu sekali)	
9	Pengaduan melalui website mojokertokota.go.id	9 Jumlah kegiatan kelompok informasi masyarakat	Ada	✓	✓	✓	✓	Dinas Kominfo	21 kelompok per bulan
10		10 Prosentase pengaduan masyarakat terkait perlindungan anak yang difasilitasi melalui e-pangaduan	Ada	100%	100%	100%	100%	Dinas Kominfo	

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
	11 Pengaduan melalui sosial media (Facebook, instagram, dan twitter)	11 Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	Ada	100%	100%	100%	100%	Humas dan Protokol	
	12 Peliputan sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Forum Anak	12 Jumlah liputan tentang UU Perlindungan Anak dan Forum Anak yang dipublikasikan	Ada	48 edisi	48 edisi	48 edisi	48 edisi	BKBPP dan Dinas Kominfo	Media Cetak "Palapa Kota Mojokerto"
	13 Evaluasi program pembinaan LSM	13 Jumlah LSM yang diberikan pembinaan tentang perlindungan anak	Ada	✓	✓	✓	✓	BKBPP dan Bakesbangpol	
Masih kurang adanya keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Kota Mojokerto	1 Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	1 Jumlah Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan pemulihian gizi anak	Ada	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan dan Bappeko	Melalui program CSR
	2 Optimalisasi posyandu dan TPG di Kota Mojokerto	2 Jumlah posyandu dan TPG di Kota Mojokerto	Ada	✓	✓	✓	✓	Dinkes	
	3 Pameran keliling untuk menginformasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak	3 Jumlah pameran keliling yang menginformasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak	Ada	10x	10x	10x	10x	Dinas Kominfo dan BKBP	
	4 Kegiatan siaran keliling dengan memberikan informasi tentang pemenuhan hak anak	4 Jumlah siaran keliling yang menginformasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak	Ada	12x	12x	12x	12x	Dinas Kominfo dan BKBP	
	5 Iklan layanan masyarakat tentang anak dan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam memenuhi hak dan perlindungan anak	5a. Jumlah layanan masyarakat tentang keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Ada	1080 x	1080 x	1080 x	1080 x	Diskominfo, BKBPP	Radio Gema FM, Palapa, PPA, LPA. Penyiaran mengenai iklan anak dalam 1 hari sebanyak 3 kali
		5b. Jumlah iklan layanan melalui videotron	Belum Ada	-	2	2	2	Humas, KBPP,	Terdapat 2 titik penyiaran mengenai hak dan perlindungan anak (benteng Pancasila dan

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
6	Koordinasi dengan para pelaku usaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD-KLA	6a. Jumlah koordinasi dengan para pelaku usaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD-KLA 6b. Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk program KLA	Belum Ada	-	2	2	2	Bappeko, BKBP	Masih akan dirapatkan kembali melalui forum CSR
7	Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR-nya untuk implementasi RAD KLA di Kota Mojokerto	7 Penyusunan profil anak	Belum Ada	-	2	4	6	Bappeko dan BKBP	
Belum optimalnya penyusunan Profil Anak di Kota Mojokerto	1	Buku profil anak	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP	
Belum optimalnya keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	1	Melakukan pendataan lembaga yang memberikan layanan kepada anak	1 Data lembaga penyedia layanan untuk anak (posyandu, polindes, pokesdes, BKB, BKR, dll)	Belum Ada	-	✓	✓	BKBPP	
2	Melarifikasi layanan agar memiliki perspektif pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan KHA	2 Lembaga penyedia layanan untuk anak yang memiliki perspektif pemenuhan hak dan perlindungan anak	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP	

B. Kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING (Meningkat)	WAKTU			PJ/SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018		
Belum terpenuhinya hak pencatatan kelahiran bagi semua anak di Kota Mojokerto (cakupan akte kelahiran)	1. Program penataan administrasi kependudukan	1. Prosentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	Ada (Meningkat)	81%	90%	95%	100%	Dispendukcapil
	2. Pelayanan kependudukan berupa kartu identitas anak	2. Prosentase anak baru lahir yang mendapatkan Kartu Identitas Anak	Belum Ada	30%	60%	75%	85%	Dispendukcapil
	3. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	3a. Jumlah petugas pelayan akte yang dilatih admininduk	Ada	6	8	10	10	Dispendukcapil
		3b. Prosentase kerjasama pelayanan akte kelahiran dengan rumah sakit/ rumah sakit bersalin/ bidan/ puskesmas	Ada	15%	50%	60%	80%	Dispendukcapil
		3c. Jumlah perangkat kelurahan, kecamatan, dan petugas rumah sakit yang mendapatkan pelatihan tentang pencatatan kelahiran	Ada	40	42	42	42	Dispendukcapil
	4. Penyusunan SOP dan SOP pencatatan kelahiran	4. SPP dan SOP pencatatan kelahiran						Dispendukcapil
								Pelayanan akte kelahiran bebas bea mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun. Sejak tahun 2014
	5. Penyusunan Perda Administrasi Kependudukan		Ada	✓	✓	✓	✓	Dispendukcapil
	6. Sosialisasi bidang kependudukan dan catatan sipil pada	6. Prosentase masyarakat yang paham tentang kependudukan dan pencatatan sipil	Ada	75%	80%	85%	90%	Dispendukcapil

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
	masyarakat								
7.	Pelatihan bagi satker penyedia layanan informasi agar sensitif dan berpihak pada anak sehingga informasi yang diberikan layak anak	7. Jumlah SDM OPD yang dilatih informasi layak anak	Belum Ada	-	-	36	72	BKBPP	
Belum tersedianya fasilitas informasi layak anak di tempat publik di seluruh Kota Mojokerto	1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1a. Perpustakaan kelurahan 1b. Perpustakaan masjid/musholla 1c. Perpustakaan keliling 1d. Pojok baca 1e. Taman Pintar	Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Ada	18 25 37 1 2	18 1 1 1 2	18 3 40 3 3	18 3 48 3 3	Kantor perpustakaan dan arsip Kantor perpustakaan dan arsip Kantor perpustakaan dan arsip Kantor perpustakaan dan arsip DLH	Sudah ada perencanaan penambahan Taman Pintar untuk tahun 2018 dan 2019
	1f. Lembaga pengawas materi informasi layak anak		Belum ada	Belum ada	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Dishubinfokom dan Kantor Perpus, Satpol PP, BKBPP	
	1g. Joglo baca terpadu di Hutan Kota		Belum Ada	-	-	1	1	PU, DLH, Kantor perpustakaan dan arsip	
2	Penyediaan sarpras/membuat website sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan stakeholders	2 website yang mudah diakses oleh masyarakat dan dapat mengedukasi anak-anak di Kota Mojokerto maupun dalam penyampaian aspirasi	Ada	✓	✓	✓	✓	Diskominfo, kantor perpus dan arsip, BKBPP	Ada dan aktif

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
Mendesak terbitnya pilwali tentang Tim pengawas informasi layak anak	3	Mendesak terbitnya pilwali tentang Tim pengawas informasi layak anak	3	Perwali tentang pembentukan tim pengawas informasi layak anak beserta SOP nya	Belum Ada	-	✓	✓	Dinas Kominfo, Satpol PP dan BKBPP
	4	Membentuk tim pengawas informasi layak anak	4	Tim pengawas informasi layak anak di Kota Mojokerto	Belum Ada	-	✓	✓	Dinas Kominfo, Satpol PP, BKBPP, Dinas Perpustakaan Arsip
	5	Penyusunan program kerja tim pengawasan dan penyedia informasi layak anak	5	Program kerja pengawasan informasi layak anak	Belum Ada	-	✓	✓	Tim pengawasan, Dishubkominfo, Satpol PP, BKBPP
	6	Sosialisasi dan pengawasan dalam rangka pengawasan dan penyediaan informasi layak anak untuk pengusaha penyedia informasi	6	Prosentase pengusaha penyedia informasi yang berkomitmen menyediakan informasi layak anak	%	-	100%	100%	Dinas Kominfo dan BKBPP
	7	Penyedia tenaga ahli IT dan pengawasan informasi layak anak	7	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengawasan infomasi layak anak	Belum Ada	-	2	3	Diskominfo, Satpol PP dan BKBPP
	8	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan informasi agar layak anak	8	Prosentase ketersedian sarana dan prasarana pengawasan informasi agar layak anak yang lengkap dan memadai	Belum Ada	-	100%	100%	Dinas Kominfo, Satpol PP, BKBPP
	Minimnya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan terbaik anak di Kota Mojokerto	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1a.	Prosentase forum anak, termasuk kelompok anak yang ada di kota, kecamatan, kelurahan	0%	4%	100%	100%	BKBPP dan Kecamatan/ Kelurahan
			1b.	Jumlah forum anak yang dibentuk di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	0	1	21	Meni ngkat	BKBPP dan Kecamatan/ Kelurahan
			1c.	Pertemuan berkala dan berjenjang forum anak dengan kelompok anak lainnya	Belum Ada	-	12x	12x	BKBPP dan Kecamatan/ Kelurahan

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
	2 Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi anggota forum anak	2 Prosentase anggota forum anak yang memahami Konvensi Hak Anak	Belum Ada	-	100%	100%	100%	BKBPP, Kecamatan	
	3 Pelatihan manajemen organisasi forum anak	3 Prosentase anggota forum anak yang memiliki kemampuan manajemen organisasi forum anak	Belum Ada	-	100%	100%	100%	BKBPP	
	4 Konggres Anak	4 Jumlah Konggres Anak	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP dan Kecamatan	Dilaksanakan dua tahun sekali
	5 Koordinasi rutin Forum Anak	5 Jumlah Koordinasi rutin Forum Anak untuk memperlancar program kerja Forum Anak	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP, Kecamatan dan Dinas Pendidikan	
	6 Pelatihan KHA bagi LSM pendamping Anak (LPA, PKK, P3K2)	6 Jumlah KHA LSM pendamping Anak (LPA, PKK, P3K2) yang dilatih KHA	Belum Ada	-	✓	✓	✓	BKBPP dan Bakesbangpol	
	7 Sosialisasi KHA bagi masyarakat/ orang tua	7 Prosentase peserta sosialisasi (masyarakat/orang tua) yang memahami KHA	Belum Ada	-	100%	100%	100%	BKBPP	
	8 sosialisasi KHA bagi sekolah	8 Prosentase guru yang memahami KHA	Belum Ada	-	-	100%	100%	BKBPP dan Dinas Pendidikan	
	9 Sosialisasi tentang forum anak ke sekolah, masyarakat dan Tim Gugus Tugas KLA	9 Prosentase sekolah yang mendukung Forum Anak	Belum Ada	-	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan BKBPP	

C. Kluster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
Masih adanya anak-anak yang menikah dengan usia perkawinan di bawah 18 tahun	1. Program kesehatan reproduksi remaja	1. Jumlah usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	24	28	24	20	16	BKBPP, Dinas Pendidikan	
	2. Program penegakan PERDA	2. Jumlah anak yang terjaring operasi pekat	40	40	35	30	25	Satpol PP	
	3. Operasi gabungan	3. Jumlah operasi rutin ditempat rawan pelanggaran perda	Sehari 3x	Sehari 3x	Sehari 3x	Sehari 3x	Sehari 3x	Satpol PP	
	4. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan keagamaan	4. Prosentase Remaja Masjid yang memahami kesehatan reproduksi	Belum Ada	-	100%	100%	100%	Bag. Adm Kesra	Sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak usia dini
	5. Kegiatan pembinaan remaja masjid (remas)	5. Jumlah remaja masjid yang mengikuti pembinaan	Belum Ada	-	80	100	100	Bag. Adm Kesra	
Belum adanya lembaga yang menangani konsultasi bagi orang tua/ keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak	1. Program pengasuhan berkelanjutan (continuum of Care for Children)	1a. lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak	Ada	✓	✓	✓	✓	BKBPP	Bina Keluarga Balita dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
		1b. Prosentase orang tua/ keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi	%	2%	4%	6%	8%	BKBPP BKBPP, Dinsos, Dinkes	Ada dan meningkat setiap tahunnya
		1c. Jumlah LKSA dan jumlah anak yang dilayani LKSA baik di dalam maupun di luar LKSA (di asuh keluarga sendiri)	Ada	✓	✓	✓	✓		Ada dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan diluar asuhan keluarga
		1d. Jumlah LKSA yang terdaftar, yang memiliki kebijakan serta mekanisme pemenuhan hak dan perlindungan anak	6	6	7	8	9		6 LKSA pada tahun 2016 dan akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya

OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN	
				2016	2017	2018	2019			
Belum tersedianya Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/ Keluarga tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak dan Lembaga Sosial Kesejahteraan Anak (LKSA)	1	Menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	I	Prosentase peristiwa pengangkatan anak dan mekanisme pemantauan secara periodik terhadap anak angkat	Ada	100%	100%	100%	Dinsos, Dinkes, LPA, Lembaga Konseling, BKBPP	Terdapat 2 Anak pada tahun 2016. Dinsos bekerjasama dengan Tim.

D. Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)	1	Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak	1. AKB	7,87/1000 KH	<7,87/100 KH	menurun	menurun	menurun	Dinas Kesehatan
	2	Penatalaksanaan BBL melalui persalinan Nakes	2.	Prosentase Ibu yang melahirkan mendapatkan pertolongan dari Nakes	96%	95%	96%	97%	Dinas Kesehatan
	3	Home visit bidan puskesmas	3.	Prosentase Cakupan KN lengkap	100%	97%	98%	98%	Dinas Kesehatan
	4	Pendampingan DSA/ DSOG & pendampingan PKK & LSM	4.	Prosentase Cakupan Neo Komplikasi	95%	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan
	5	AMP Kasus Kematian Bayi	5a.	Prosentase Cakupan pelayanan bayi paripurna	93%	96%	96%	97%	Dinas Kesehatan
	5b.		5b.	Prosentase Cakupan pelayanan balita paripurna	90%	83%	84%	85%	Dinas Kesehatan
	5c.		5c.	Prosentase Cakupan DDTK bagi balita	90%	83%	84%	85%	Dinas Kesehatan
	5d.		5d.	Prosetase Cakupan pelayanan apras paripurna	90%	79%	80%	81%	Dinas Kesehatan
	6	Pelatihan SIDDTK bagi guru TK/ PAUD	6.	Guru TK/ PAUD terlatih	199	239	✓	✓	Dinas Kesehatan

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
	7. Pelatihan SIDDTK baik Nakes	7. Nakes terlatih SIDDTK	38	78	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	Ada dan mengalami peningkatan setiap tahun
	8. Pelatihan MTBM/ MTBS bagi Nakes	8a. Nakes terlatih MTBM/ MTBS	35	65	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	Ada dan mengalami peningkatan setiap tahun
		8b. Time Respon	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	Dinas Kesehatan	
	DDTK	8c. Prosentase Cakupan Kepemilikan Buku KIA	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
	MTBM/ MTBS								
	9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	9a. Prosentase ANC (Anetenatal Care Terpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		9b. Prosentase Persalinan oleh Nakes	96%	95%	96%	97%	> 97%	Dinas Kesehatan	
	10. Program Kesehatan Anak	10a. Prosentase IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	42,16%	41%	44%	47%	50%	Dinas Kesehatan	
		10b. Prosentase Penatalaksanaan BBL (Bayi Baru Lahir)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
Belum tercapainya imunisasi dasar lengkap di Kota Mojokerto	1. Tercapainya imunisasi dasar lengkap di Kota Mojokerto	1a. Prosentase imunisasi dasar lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		1b. Prosentase desa/ kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		1c. Prosentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di Kota Mojokerto	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
Masih belum terpenuhinya Gizi pada Balita di Kota Mojokerto secara merata	1. Pervalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stuntingan dan Gizi Lebih pada Balita	1a. Prosentase Gizi Kurang	2,57%	menurun	menurun	menurun	menurun	Dinas Kesehatan	
		1b. Prosentase Gizi Buruk	0,38%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	Dinas Kesehatan	
		1c. Prosentase Stunting	22,3%	27,2%	26,2%	25,2%	25%	Dinas Kesehatan	
		1d. Prosentase Gizi Lebih	2,37%	menurun	menurun	menurun	menurun	Dinas Kesehatan	
	2. Program perbaikan gizi: Pengadaan susu PMT pemulihan untuk kelompok	2a. Prosentase ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT pemulihan (prioritas gakin)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
	rawan gizi (ibu hamil KEK, bayi dan balita kurang gizi/gizi buruk)	2b. Prosentase balita kurus yang mendapat PMT pemulihan (prioritas gakin)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
	3. TPG (Taman Pemulihan Gizi) bagi pemulihan pervalensi gizi buruk	3. Prevalensi Gizi Buruk	0,40%	2%	1,50%	1%	<1%	Dinas Kesehatan	
	4. Pelatihan kader posyandu mahir gizi (pervalensi stunting)	4. Prosentase Kader Gizi yang mahir gizi	22,30%	27,20%	26,20%	25,20%	25%	Dinas Kesehatan	
	5. Paguyuban keluarga sadar gizi (pervalensi gizi lebih)	5. Prosentase keluarga sadar gizi	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	Dinas Kesehatan	
	6. Monitoring pelayanan di posyandu	6. Prosentase Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
	7. Pertemuan revitalisasi posyandu	7. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
	8. Pelacakan kasus gizi buruk	8. Prosentase puskesmas yang memiliki konselor PMT	40%	40%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
	9. Pemeriksaan balita gizi buruk oleh dokter dan dokter spesialis anak	9. Prosentase puskesmas yang memiliki konselor PMBA	0%	0%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
	10. Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) bagi tenaga kesehatan	10. Prosentase tenaga kesehatan yang dilatih PMBA	0%	0%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
	11. Pelatihan cipta menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman	11. Jumlah warga PKK yang telah memahami dalam pembuatan menu B2SA	60	60	60	132	208	Dinas Perekonomian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Masih belum optimalnya	1. Pelatihan konselor menyusui bagi tenaga kesehatan	1. Prosentase puskesmas yang memiliki konselor ASI	40%	40%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN	
				2016	2017	2018	2019			
Pemberian ASI Eksklusif dan Tersedianya Pojok ASI	2.	Pendampingan Bumil risti dan ASI Eksklusif oleh kader	2.	Prosentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Belum Ada	65%	70%	75%	80%	Dinas Kesehatan
	3.	Pelatihan konseling gizi	3a	Prosentase puskesmas yang membina KPASI (Kelompok Pendukung ASI)	40%	60%	60%	80%	100%	Dinas Kesehatan
			3b	Prosentase Sarasehan ASI eksklusif	60%	50%	60%	80%	100%	Dinas Kesehatan
Belum adanya Ruang Laktasi di lingkungan Kota Mojokerto	1	Penyediaan ruang laktasi di ruang publik	1a.	Jumlah ruang laktasi dan fasilitas menyusui	14	16	18	20	22	Seluruh SKPD
			1b.	Ruang laktasi kecamatan	0	0	3	3	3	Kecamatan
			1c.	Prosentase puskesmas ramah anak (PRA)	Belum Ada	✓	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	2	Sarana kesehatan yang ramah anak	2a	Puskesmas dengan SK ramah anak	Belum Ada	-	2 puskesm as			Dinas Kesehatan
			2b	Rumah Sakit Ramah Anak	Belum Ada	-	1	1	1	RSU dan Dinas Kesehatan
Belum tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan Reproduksi dan Mental	1	Puskesmas terlatih PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)	1	Jumlah puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)	Ada	5 puskesm as	5 puskesm as	5 puskesm as	5 puskesma s	Dinas Kesehatan, Dinas PPKB
	2	Konseling pelayanan kesehatan reproduksi remaja remaja dan disabilitas	2	Jumlah puskesmas terlatih KTA	Ada	5 puskesm as	5 puskesm as	5 puskesm as	5 puskesma s	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, KBPP
	3	Pelatihan Kesehatan Reproduksi terhadap siswa SMP, SMA, Karang Taruna, Tiwisada	3	Prosentase Cakupan remaja yang terpapar kesehatan reproduksi	1%	2%	3%	4%	5%	Dinas Kesehatan

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
	4 Sosialisasi/ road show mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja	4 Prosentase KTD menurun	28	menurun	menurun	menurun	menurun	Dinas Kesehatan	
	5. Program Anak Remaja: Screening kesehatan bagi anak	5 Prosentase Cakupan penjaringan kesehatan tingkat SD/MI	100%	55%	60%	65%	70%	Dinas Kesehatan, BKBPP, dan Dinas Pendidikan	
	6. Pelatihan kader Tiwisada/ dokter kecil	6. Prosentase kader tiwisada/ dokter kecil tiap sekolah	7%	8%	9%	9,5%	10%		
	7. Pembentukan Kesehatan Jasmani	7. Prosentase kelompok olah raga yang dibentuk	0%	2%	3%	4%	5%		
	8. Pembentukan Peer Konselor Remaja	8. Prosentase puskesmas yang melaksanakan peer konselor	80%	85%	85%	90%	95%		
	9 Pelatihan kader kesehatan remaja	9. Prosentase Kader kesehatan Remaja yang dilatih	5%	6%	7%	7,5%	8%		
	10 Pelayanan kesehatan reproduksi remaja	10. Prosentase puskesmas yang melaksanakan puskesmas ramah remaja	100%	100%	100%	100%	100%		
	11 Pemilihan duta remaja	11. Prosentase duta kesehatan remaja yang terlatih kespro di Kota Mojokerto	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes, BKBPP, Dinsos, Dinas Pendidikan, Disporabudpar	
	12 Konseling tumbuh kembang dan kespro remaja	12. Prosentase puskesmas yang melaksanakan tumbang dan kespro	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes, BKBPP, Dinsos, Dinas Pendidikan	
	13 Outlet TTD di sekolah	13. Jumlah remaja putri yang mendapat TTD	1%	7%	10%	12%	15%	Dinkes, BKBPP, Dinsos, Dinas Pendidikan	
Masih adanya Anak dari Keluarga Miskin yang belum memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan	1 Program peningkatan akses kesejahteraan	1 Prosentase anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan		100%	100%	100%	100%	BKBPP, Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinkes	

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN	
				2016	2017	2018	2019			
Masih kurangnya akses rumah tangga terhadap air bersih	1	Pendataan RT Pemakai air bersih	1	Prosentase rumah tangga dengan akses air bersih	78%	78%	83%	88%	93%	Dnas PKP, Dinkes
	2	Program peningkatan kemampuan Teknologi Industri Kegiatan Pelatihan Teknologi IKM Makanan Minuman	2	Prosentase IKM makanan dan minuman yang membuat makanan dan minuman sehat	100 dari 483 unit usaha makanan minuman	28%	36%	44%	52%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Program perlindungan konsumen, kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	3	Prosentase makanan dan minuman tidak layak edar yang ditemukan	-	20%	15%	10%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Belum tersedianya kawasan tanpa rokok	1	Penyediaan kawasan tanpa rokok di lingkungan Kota Mojokerto	1	Prosentase tempat publik menjadi kawasan tanpa rokok	Hanya kawasan tertentu (Rumah Sakit dan Puskesmas)	Semua fasilitas publik sebagai kawasan tanpa rokok	Semua fasilitas publik sebagai kawasan tanpa rokok	Semua fasilitas publik sebagai kawasan tanpa rokok	DPU, Dinkes, Satpol PP	

E. Kluster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
Belum adanya peningkatan angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (Usia Pra-sekolah/ 0-6 tahun)	1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	1. Prosentase peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)	86%	86%	88%	89%	90%	Dinas Pendidikan	Lembaga penyelenggara PAUD dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK/TKLB), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis.
	2. Memperbanyak jumlah lembaga penyelenggara PAUD/ Kelompok Bermain (TK, RA, TPA, SPS, KB)	2. Prosentase Kelurahan memiliki TK/ Kelompok Bermain yang dapat dijangkau, bisa juga sampai tingkat RW	Ada (142 dari 180) 78%		82%	85%	87%	Dinas Pendidikan	
	3. Jumlah PAUD Holistik Integratif (PAUD, Posyandu dan BKB)	3. Jumlah PAUD Holistik Integratif (PAUD, Posyandu, BKB)	TK = 58 RA=6 TPA=4 SPS=10 KB=64	TK = 58 RA=6 TPA=4 SPS=10 KB=64	TK =58 RA=6 TPA=4 SPS=10 KB=64	TK =60 RA=6 TPA=4 SPS=10 KB=66	TK =60 RA=6 TPA=4 SPS=10 KB=66	Dinas Pendidikan	
Masih kurangnya partisipasi siswa wajib belajar pendidikan 12 tahun	1. Angka putus sekolah	1. Prosentase angka anak putus sekolah	SD = 0 SMP = 0 SMA = 0,50	SD = 0 SMP =0 SMA = 0,48	SD =0 SMP =0 SMA = 0,47	SD =0 SMP = 0 SMA = 0,45	SD =0 SMP = 0 SMA = 0,45	Dinas Pendidikan	
	2. Jumlah sekolah inklusi di Kota Mojokerto	2. Prosentase peningkatan jumlah sekolah inklusi (SD dan SMP)	SD=4 lbg SMP=0 lbg	SD=4 lbg SMP=0 lbg	SD=6 lbg SMP=1 lbg	SD=7 lbg SMP=2 lbg	SD=8 lbg SMP=3 lbg	Dinas Pendidikan	
	3. Upaya aktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir ke satuan pendidikan	3a. Tingkat kelulusan Siswa SD	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
		3b. Tingkat Kelulusan Siswa SMP	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
	1. Mengembalikan anak-anak DO ke sekolah,	1. Prosentase anak DO yang kembali ke sekolah formal	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	

ISU STRATEGIS	KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
					2016	2017	2018	2019		
	2	Memasukkan anak-anak DO yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah Formal ke Program Paket A/ B / C	2	Prosentase Anak-anak yang DO mendapatkan layanan Paket A dan B dan C	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
	3	Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya	3a.	Prosentase Anak-anak yang berada pada situasi khusus (Pekerja Anak, anak terlantar dll) dapat dikembalikan ke sekolah atau mendapatkan layanan ketrampilan	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
Belum tersedianya Sekolah Ramah Anak di Kota Mojokerto	1	Memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Ramah Anak di Kota Mojokerto	1a	Prosentase Sekolah Ramah Anak	0	0	3	10	20	Dinas Pendidikan
			1b	Prosentase Standar Pelayanan Minimal di Satuan Pendidikan		10%	15%	20%	25%	Dinas Pendidikan
			1d	Prosentase sekolah yang memiliki gerakan siswa bersatu mewujudkan SRA terintegrasi ke dalam RKAS	%	-	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan, BKPP
			2a	Prosentase sekolah yang memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
	2	Menciptakan Masa Orientasi Siswa yang ramah anak	2a	Prosentase sekolah yang memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			3a.	Prosentase sekolah yang menerapkan penegakan disiplin dengan non kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			3c.	Prosentase sekolah yang melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin	Belum Ada	-	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
		3d. Prosentase sekolah yang mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan	Belum Ada	-	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
4.	Menghapus segala bentuk pungutan di dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang telah didanai oleh APBN dan APBD	4a Prosentase sekolah yang melaksanakan penghapusan pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD	60%	60%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Bagian Kesra	Tahun 2016 TK masih dilakukan pungutan (SPP)
		4b Prosentase sekolah yang melaksanakan afirmasi bagi warga miskin sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
5	Pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan	5. Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat pelatihan SRA	Belum Ada	-	179	316	453	BKBPP	
6	Tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak	6 Adanya dokumen kurikulum yang berbasis Hak Anak	Ada	✓	✓	✓	✓	Dinas pendidikan	
7	Sarana dan Prasarana SRA	7a. Prosentase sekolah yang memiliki ruang indoor dan outdoor untuk bermain dan belajar di luar ruangan kelas	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan, DLH, Disporabudpar	Jumlah dalam tahun 2016 ada 7 sekolah: 1. SDN Wates 2 2. SDN Gedongan 2 3. SDN Kranggan 4 4. SDN Kranggan 1 5. SMP Negeri 6 6. SMP Negeri 5 7. SMP Negeri 3
		7b. Sekolah Adiwiyata	Ada	11	17	23	29	Dinas pendidikan dan	Tahun 2016 Tingkat Kota:

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
								DLH	<p>1. SDN Kranggan 4 2. SDN Gedongan 2</p> <p>Tingkat Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> SDN Kranggan 1 SDK Wijana Sejati SMP Negeri 3 SMP Negeri 6 <p>Tingkat Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> SMP Negeri 6 SMP Negeri 9 SMA Negeri 1 <p>Tingkat Mandiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> SDN Wates 6 SMA Negeri 2 <p>Tahun 2017</p> <p>Tingkat Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> SDN Miji 1 SDN Wates 6 SD Muhammadiyah Plus <ol style="list-style-type: none"> SMP Islam Brawijaya SMP Permata SMA PGRI <p>Tahun 2018 dan 2019 direncanakan masing-masing terdapat penambahan 6 sekolah</p>
8	Mewujudkan kawasan Sekolah tanpa rokok di Kota Mojokerto	8	Prosentase Sekolah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok	Belum ada	Belum Ada	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN	
				2016	2017	2018	2019			
								Perekonomian		
	9	Mewujudkan kawasan Sekolah bebas napza di Kota Mojokerto	9	Prosentase sekolah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Dinkes	
\Belum optimalnya penyediaan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah	1	Penyediaan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah	1a	Rute Aman dan Selamat (RASS)	Ada	√	√	√	Dinas Perhubungan	Fasilitas yang diberikan adalah marka jalan, zona selamat sekolah, halte permanen dan trotoar serta bantuan angkot gratis (lyn) untuk mengangkut anak-anak sekolah
			1b.	Jalur Khusus Sepeda	Belum Ada	-	8 ruas jalan	12 ruas jalan	Dinas Perhubungan	Berupa jalur sepeda yang dilengkapi marka dan rambu lalu lintas khusus jalur sepeda
			1c.	Jalur Pejalan Kaki	Ada (Belum optimal)	-	8 ruas jalan	12 ruas jalan	Dinas Perhubungan, Dinas PU	Berupa Trotoar dan Tempat Penyeberangan (Zebra Cross), sudah ada namun perlu ditingkatkan dan dilengkapi dengan fasilitas untuk difable
			1d.	Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka)	Ada (belum optimal)	3 unit	6 unit	9 unit	Dinas Perhubungan	Marka jalan, rambu lalu lintas, alat pengaman pemakaian jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
1.	Peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat	1e. Bus sekolah/ Angkutan Sekolah	Bus Sekolah: Belum ada Angkutan Sekolah: Sudah ada dan gratis bagi pelajar	13 angkot gratis	2 unit bus 3 unit mobil Luxio 13 unit Angkot	2 unit bus 6 unit Luxio 13 unit Angkot	2 unit bus 9 unit Luxio 13 unit Angkot	Dinas Perhubungan	halte, dan fasilitas pejalan kaki sudah lengkap tapi belum merata, masih perlu ditingkatkan. Masih kurang mengakomodir kebutuhan pejalan kaki difable
		1f. Prosentase Infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, jembatan penyeberangan, naungan/tempat berteduh, garis penyeberangan, tersedia fasilitas rekreatif dan edukatif, rambu lalu lintas dll.)	Ada	-	100%	100%	100%	DPU	Bus sekolah diganti dengan angkot gratis bagi pelajar. Pada tahun 2017, Kota Mojokerto akan mendapatkan bantuan berupa 2 bus untuk angkutan sekolah.
		1g. Alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, tongkat penyeberangan, dll.)	Ada (Belum optimal)	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	Pengadaan tongkat penyeberangan
		1h. Jalur Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	Belum optimal	-	√	√	√	Dinas PU/ Dinas Perhubungan	
	2. Peningkatan budaya tertib berlalu lintas	2a. Polisi Sahabat Anak	Ada (belum optimal)	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	Ada tapi belum optimal, tidak

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN		
				2016	2017	2018	2019				
2. Peningkatan Keamanan Sekolah dan Pelajar	2. Peningkatan Keamanan Sekolah dan Pelajar								dilaksanakan secara rutin		
				2b. Pendidikan tentang tertib berlalu lintas	Ada	250 siswa	500 siswa	750 siswa	1000 siswa	Dinas Perhubungan	Pendidikan di masing-masing sekolah dan termuat di dalam pelajaran. Tiap tahun terdapat 5x kegiatan dan mendidik 250 siswa
				2c. Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas	Ada	50 siswa	50 siswa	50 siswa	50 siswa	Dinas Perhubungan	Sasaran pelajar tingkat SMA setiap tahun 1x kegiatan
				2d. Patroli Keamanan Sekolah	Ada	√	√	√	√	Satpol PP, Dinas Pendidikan	Masih belum rutin dan optimal
				2e. Pengawalan Anak Sekolah	Ada	√	√	√	√	Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan	Masih terbatas oleh pengawalan orang tua pelajar masing-masing. Dishub memiliki anggota yang menjaga di depan sekolah
				2f. Pemeriksaan kelayakan transportasi sekolah	Belum Ada	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	Dilakukan rutin setiap bulan
				2g. Pelatihan Hak Anak bagi petugas keamanan	Belum Ada	-	√	√	√	BKBPP	
				2h. Cara Aman Berjalan	Ada	-	√	√	√	Dinas Perhubungan	Pendidikan di masing-masing sekolah dan termuat di dalam pelajaran
	3. Terdapat pendidikan yang mengajarkan	3a. Safety riding/ Road safety	Ada	√	√	√	√	Dinas Perhubungan			

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN	
				2016	2017	2018	2019			
	kepada anak tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar di jalan	3b. Taman lalu lintas	Belum Ada	-	1	2	3	Dinas Perhubungan dan DLH	Tahun 2017 akan dipersiapkan taman lalu lintas yang berlokasi di dekat TPST Magersari	
		3c. Peta perjalanan anak ke dan dari sekolah	Ada	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	Sudah ada di masing-masing terminal pemberhentian angkutan sekolah, dan akan dikembangkan ke Blooto tahun 2017	
Belum optimalnya penyediaan fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah	1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1 Angka kenakalan remaja	%	-	✓	✓	BKBPP, Dinas Pendidikan, Disporabudpar, Satpol PP		
	2	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	2 Jumlah kegiatan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah (Sasarannya pemuda di Kota Mojokerto)	Ada (belum optimal)	0	1	2	Disporabudpar		
	3	Tersedianya taman kota dan ruang bermain ramah anak sesuai dengan kriteria minimum di ruang publik	3a. Jumlah fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak (sanggar, arena bermain, taman, dsb)	Ada (belum optimal)	10 taman	13 taman	16 taman	19 taman	Disporabudpar, DLH	Akan ditingkatkan setiap tahun untuk mengakomodir kegiatan kreatif anak-anak di ruang terbuka maupun tertutup
			3b. Jumlah ruang bermain anak yang telah sesuai dengan kriteria minimum penyediaan ruang bermain di ruang publik	Ada (belum optimal)	10 taman	13 taman	16 taman	19 taman	Disporabudpar, DLH, Dinas PU	Tahun 2016: 1. Taman Surodinawan I 2. Taman Surodinawan II 3. Taman Surodinawan III 4. Taman Benteng Pancasila

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
		3c. Jumlah taman Kota	Ada (belum optimal)						5. Taman RTH Semeru 6. Taman Magersari 7. Ttaman Magersari (Jl. Belimbang) 8. Taman TPA (Randegan) 9. Alun-alun Kota 10. Taman Pramuka Tahun 2017: 1. Taman Suromulang 2. Taman Perum Surodinawan 3. Taman Lapangan Jl. R. Wijaya Tahun 2018 dan 2019 masih direncanakan penambahan taman di lokasi-lokasi yang lain
				√	√	√	DLH	1. Taman Anggur dan Pembangunan Taman di Magersari 2. Taman Mayjen Sungkono 3. Taman Belimbang 4. Taman Tropodo 5. Taman Belakang Korem 082 6. Taman Jl. KH. Mas Mansyur dan Depan Masjid Agung	

ISU STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019		
		3d. Jumlah Taman di Kecamatan	Ada (belum optimal)	√	√	√	√		7. Taman RTH Surodinawan, depan TMP dan Depan PMI 8. Taman Vertikal 9. Taman By Pass 10. Taman Air Mancur 1. Taman Anggur dan Pembangunan Taman di Magersari 2. Taman Mayjen Sungkono 3. Taman Belimbing 4. Taman Tropodo 5. Taman Belakang Korem 082 6. Taman Jl. KH. Mas Mansyur dan Depan Masjid Agung 7. Taman RTH Surodinawan, depan TMP dan Depan PMI